

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Merupakan Bentuk peningkatan pelayanan kesehatan yang signifikan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya membantu pemerintah daerah agar mencapai target nasional dibidang kesehatan dengan mengeluarkan Program yang dinamakan Bantuan Operasional Kesehatan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme tugas pembantuan.

Agar Program BOK berjalan dengan baik dan optimal maka dikeluarkan peraturan Menteri Kesehatan No 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengolahan BOK. Program Dana BOK bertujuan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dana BOK dianggarkan pemerintah untuk jangka waktu satu tahun sekali dari bulan januari hingga Desember.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional menjadi pusat pengembangan kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Pusat Kesehatan Masyarakat juga mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya (UU No.17 Tahun 2023). Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam fokus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023. Karena saat ini prioritas sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat

Anggaran kementerian Kesehatan terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan. Prioritas pertama pada Program yang sifatnya promotif preventif seperti revitalisasi puskesmas, posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat tetap sehat bukan mengobati orang sakit. Prioritas yang kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan POLRI khususnya ke penyakit yang burden of diseasesnya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke, dan kanker.

Prioritas ketiga membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerjasama dengan kementerian perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi. Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter, dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.

Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga Pembiayaan PBI JKN. Prioritas keenam yaitu dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information teknologi, Artificial Inteligent, dan semua teknologi kesehatan baru. Kemenkes dalam tiga tahun terakhir, secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan mengalami penurunan, namun

tidak mengurangi esensi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan cerminan anggaran tepat guna. APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp. 178,7 Triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp 46,5 triliun. Rincian anggaran Kesehatan dimaksud meliputi:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Anggaran Kesehatan**

| No | Tujuan Anggaran                         | Rencana Anggaran       |
|----|-----------------------------------------|------------------------|
| 1. | Transformasi Layanan Primer             | Rp5,9 triliun (7,0%)   |
| 2. | Transformasi Layanan Rujukan            | Rp18,4 triliun (21,5%) |
| 3. | Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan | Rp1,4 triliun (1,6%)   |
| 4. | Transformasi Pembiayaan Kesehatan       | Rp46,6 triliun (54,5%) |
| 5. | Transformasi SDM Kesehatan              | Rp3,8 triliun (4,4%)   |
| 6. | Transformasi Teknologi Kesehatan        | Rp0,5 triliun (0,5%)   |
| 7. | Kegiatan rutin dan dukungan manajemen.  | Rp8,9 triliun (10,4%)  |

Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan. DAK Fisik sebesar Rp. 12,9 Triliun dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp. 12,7 Triliun dialokasikan untuk biaya operasional puskesmas, pemenuhan obat esensial dan Bahan Medis Habis Pakai serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan kader. Sebanyak Rp. 26 Triliun dialokasikan untuk spesifik grant Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk prioritas pemenuhan layanan primer dan rujukan.

Parawansa (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan Di Kabupaten Jenepono”. Dengan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa pelaksanaan program dana BOK di Kabupaten Jenepono menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, baik melalui aspek kebijakan, aspek sumber daya manusia dan aspek pengorganisasian.

Amrillah (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang”. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan realisasi anggaran BOK belum berjalan dengan baik, karena belum adanya pemberian informasi mengenai penerimaan dan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban mengenai Program BOK belum terlaksana dengan baik kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dengan objek dan subjek penelitian yang berbeda yaitu dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Mengkaji dan melihat sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) sehingga diperlakukan pertanggungjawaban yang merujuk pada aspek efektifitas, akuntabilitas, dan transparansinya. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional

## **Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Untuk menganalisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk menganalisis Efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci
- b. Untuk menganalisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.
- c. Untuk menganalisis Akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci
- d. Untuk menganalisis Transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan terutama terkait dengan ilmu akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan masalah efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi program Bantuan Operasional Kesehatan

#### **1.4.2. Manfaat Praktis.**

1. Puskesmas dalam mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan sehingga efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
2. Pembuatan kebijakan terhadap penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan kesehatan di Kabupaten Kerinci.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik untuk mengetahui Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Pelompek Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pelompek. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data sekunder dan data primer dari sebuah informan.